

**PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUDHARABAH DAN HAMBATANNYA PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SUKOWATI SRAGEN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi
Ilmu Hukum Minat utama: Ekonomi Syariah



DISUSUN OLEH :

S U T R I S
S340908024

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET SURAKARTA**

2009

**PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUDHARABAH DAN HAMBATANNYA PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SUKOWATI SRAGEN**

DISUSUN OLEH:

Sutris
NIM. S340908024

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:
Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1. Pembimbing I,	Prof. Dr. Rifyal Kabah, SH
2. Pembimbing II,	Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SH, MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS
NIP.194405051969021001

**PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUDHARABAH DAN HAMBATANNYA PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SUKOWATI SRAGEN**

DISUSUN OLEH:

Sutris
NIM. S340908024

Telah disetujui oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua,	Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS NIP.194405051969021001
Sekretaris	Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum NIP.195702031985032001
Anggota	Prof. Dr. Rifyal Kabah, SH
	Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SH, MH

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS NIP.194405051969021001
Direktur Program Ilmu Hukum	Prof. Drs. Suranto. M.Sc, Ph.D. NIP.195708201985031004

PERNYATAAN

Nama : Sutris

NIM : S340908024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **”PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH DAN HAMBATANNYA PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SUKOWATI SRAGEN”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut

Surakarta, Pebruari 2010

Sutris

MOTTO

*Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
(Q.S Al-Ashr, ayat 2-3)*

*Karya ini ku persembahkan khusus buat
Yang tercinta: 1. Ibunda Kadiyen
2. Ayahanda Samino
3. Ibunda Supartini
4. Isteriku Sih Hartati
5. Ananda Hilyatussholimah dan Iham Ahmad Dhani
Semoga tetesan keringatnya dan do'anya mendapat balasan dari Allah SWT*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rohmat, Hidayah serta Inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH DAN HAMBATANNYA PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SUKOWATI SRAGEN”** semua dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan, walaupun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Sholawat dan Salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu selayaknya penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak. Ucapkan terima kasih pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr, Sp.Kj (K)**, Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak **Prof. Drs. Suranto, M.Sc, Ph.D**, Selaku Direktur Program Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak **Moh. Jamin, SH, M.Hum**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS**, Sebagai Ketua Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu **Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, MH**, Sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak **Prof. Dr. Rifyal Kabah, SH**, Sebagai Pembimbing dan Tim penguji dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini

7. Ibu **Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SH, MH** Sebagai Pembimbing dan Tim penguji Proposal tesis dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini
8. Bapak/Ibu Guru Besar dan seluruh Staf Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan perantarnya sehingga penulis dapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen dan Seluruh Staf atas do'a dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Bapak **Ir. Sunaryo**, Bapak **Fahrudin Nur S.Si**, sebagai direktur umum dan direktur operasional serta Staf PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen yang telah memberikan data-data dalam penulisan tesis ini.
11. Penghargaan kepada: **Ibunda Kadiyem, Ayahanda Samino, Ibunda Supartini, Isteriku Sih Hartati** dan **Ananda Hilyatusshoimah** dan **Ilham Ahmad Dhani** atas do'a dan dorongan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
13. Ucapak terima kasih tak terhingga kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Program pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta atas kebersamaan dan bantuannya bagi penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan do'a dan bantuannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Sragen, Pebruari 2010

Penulis

Sutris

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii	
HALAMAN PERNYATAAN	iv	
MOTTO.....	v	
KATA PENGANTAR	vi	
ABSTRAK	vii	
ABSTRAC.....	viii	
DAFTAR ISI	ix	
 BAB I: PENDAHULUAN		
A. LATAR BELAKANG	1	
B. PERMASALAHAN	7	C.
TUJUAN PENELITIAN	7	D.
KEGUNAAN PENELITIAN.....	7	
 BAB II: LANDASAN TEORI		
A. PRINSIP BAGI HASIL	8	
B. PEMBIAYAAN	9	
C. TEORI BEKERJANYA HUKUM.....	11	
D. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM ISLAM		
1. Hukum Perjanjian dalam Islam	15	
2. Syarat dan Rukun Perjanjian (<i>akad</i>) dalam Islam	16	
3. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam	18	
4. Tinjauan Tentang Pembiayaan	19	
E. BAGI HASIL DAN RESIKO	24	
F. KERANGKA BERPIKIR	28	
 BAB III: METODE PENELITIAN		
1. Jenis Penelitian	34	
2. Lokasi Penelitian	35	
3. Sumber Data	36	
4. Teknik Pengumpulan Data	37	
5. Teknik analisis Data	38	
 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A. HASIL PENELITIAN		
1. Sejarah PT. BPRS Sukowati Sragen		
a. Sejarah berdirinya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	39	
b. Dasar hukum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	40	

c.	Visi dan Misi	41
d.	Struktur Organisasi	42
e.	Produk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	43
f.	Program Unggulan	45
g.	Mitra Kerja	45
h.	Perkembangan Data Keuangan	46
2.	Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Hambatannya pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	
a.	Akad dalam kegiatan Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	46
b.	Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan dengan akad Mudharabah para PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	50
c.	Tahapan-tahapan dalam Pelaksanaan Kontrak Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	51
d.	Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam kegiatan pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	55
e.	Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan dengan akad Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	59
f.	Syarat-syarat Pembiayaan akad mudharabah yang menjadi pertimbangan bagi operasional PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen adalah	61
g.	Sistem Jaminan dalam Pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ...	63
3.	Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan dengan akad Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	64
4.	Solusi dalam menghadapi kendala operasional di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukoawati Sragen yaitu.....	66

B. PEMBAHASAN

1.	Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam pembiayaan dengan akad Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	67
2.	Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	70
3.	Solusi dan Strategi dalam mengembangkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen	82

BAB V: PENUTUP	
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA 86

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Peranan perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang selama ini dioperasionalkan, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga tercipta suatu sistem perbankan yang tangguh di era-globalisasi pada masa yang akan datang. Keberadaan Bank Syariah di Indonesia belum sepenuhnya diterima, masih ada sebagian masyarakat yang menyamakan dengan bank konvensional

Menurut Sofinayah Ghufron dalam Operasionalnya, bank syariah berada dalam beberapa koridor prinsip:

1. keadilan sebagai ruh dan misi utama. Bank Syariah memberikan bagi hasil (*mudharabah*), transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya harus selalu diupayakan, sedangkan hasilnya tidak pasti, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah pembagian keuntungan antara bank dan pengusaha atas dasar volume penjualan. Besarnya pembagian keuntungan tergantung kepada besarnya kontribusi masing-masing. Demikian pula, semakin besar posisi resiko yang ditanggung, maka hasil yang diperoleh semakin tinggi.
2. kemitraan. Posisi nasabah, investor, pengguna dana, bank berada dalam kedudukan yang sejajar sebagai mitra. Kinerja keras dan waktu mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor modal.
3. transparansi. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen bank.
4. universal dalam kemitraan. Bank syariah harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ?

2. Apa hambatan pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dan bagaimana solusinya pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam kegiatan Pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ?
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dan bagaimana solusinya pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.

KEGUNAAN PENELITIAN

1. Sebagai syarat mendapat gelar MH pada Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan syariah
3. Sebagai sosialisasi perbankan syariah dan khususnya prinsip bagi hasil dan resiko pada masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

■ **PRINSIP BAGI HASIL**

Bagi hasil adalah konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil. Akad berpola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam memproduksi barang dan jasa.

Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian dapat bervariasi: berdasarkan *profit* (dan *loss*) atau *revenue*. Pada situasi ketika standar akunting sudah dapat diterapkan secara baik, penerapan *profit and loss* akan semakin mudah diterapkan. Sebaliknya, jika standar akuntansi belum dapat diimplementasikan dengan baik, maka kedua belah pihak akan akan berpotensi untuk menghadapi perselisihan akibat perbedaan persepsi yang terjadi.

Pada transaksi berbasis *revenue sharing*, pendapatan pemegang modal hanya bergantung pada tingkat ketidak pastian usaha sementara tingkat pendapatan bagi *mudharib* akan tergantung pada tingkat ketidak pastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut.

PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH.

■ **Mudharabah:**

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.

Mudharabah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak yaitu:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *Shahib Al-mal* (atau *shahibul mal*) atau *rabb Al-mal*.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib Al-mal* (atau *shahibul mal*); pihak tersebut disebut *mudharib*.

TEORI BEKERJANYA HUKUM

Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, adanya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau kepentingan penguasa dengan kepentingan masyarakat.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa ada dua macam fungsi hukum yang berdampingan satu sama lain adalah:

1. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan
2. sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah ditentukan atau di harapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial ini.

Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang di pandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola pola kelakuan baru. Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM ISLAM

1. Hukum perjanjian dalam Islam

Menurut Syamsul Anwar istilah perjanjian disebut "*akad*" dalam hukum Islam. *Akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu

Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan *akad* sebagai perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.

Menurut Tahir Azhary hukum perjanjian Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al Quran, Hadits, dan Ra'yu (*Ijtihad*) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

■ Syarat dan Rukun Perjanjian/Kontrak (*Akad*) dalam Islam

Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, hal ini dilakukan agar akad yang dilakukan sah menurut hukum. Sedangkan syarat mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun.

■ Syarat *Akad*

Menurut Suhendi Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam *akad*:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah *akad* orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lain.
2. Yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.
3. *Akad* itu diijinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang lain yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang
4. Janganlah *akad* itu akad yang dilarang oleh *syara'* seperti jual beli mulasamah.
5. *Akad* dapat memberikan *fardah* sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
7. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

■ Rukun Perjanjian/Kontrak (*Akad*)

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagian mereka mengatakan rukun kontrak adalah *al-aqidain*, *mahallul 'aqad*, dan *al-aqad*. Komponen yang harus dipenuhi dalam pembentukan kontrak (akad):

1. Ijab qabul (*Shigat* kontrak)
Formulasi ijab qabul dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis.
2. *Mahal al 'aqd* (Obyek kontrak)
Obyek hukum dalam muamalah jangkannya sangat luas, bentunya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam kontrak jual beli obyeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam kontrak gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam kontrak sewa menyewa obyek kontraknya adalah manfaat yang disewa seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam kontrak bagi hasil, obyeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.
3. Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (*al'Aqidain*)
Pihak-pihak yang melaksanakan akad kontrak disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban, Subyek hukum dapat manusia dan badan hukum.
4. *Maudhu'ul 'Aqd* (Tujuan kontrak dan akibatnya)
Tujuan kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul 'Aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak

adalah *al musyarri* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar ini semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.

■ Asas-asas Kontrak/Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak/perjanjian, jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak, maka berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuat. Menurut Fathurrahman Djamil setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, sebagai berikut:

1. Kebebasan (*Al Hurriyah*)

Pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya

2. Persamaan dan kesetaraan (*Al Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain

3. Keadilan (*Al 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajibannya, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

4. Kerelaan (*Al Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.

5. Tertulis (*Al Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukan secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

■ Tinjauan Tentang Pembiayaan

a. Pembiayaan Pada Umumnya

Kegiatan usaha perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1998 meliputi:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *akad mudharabah*, *akad musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiyah bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Akad *Murabahah*, *akad salam*, *akad istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qordh*.

- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil.

■ Fungsi pembiayaan yang diberikan bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada masyarakat adalah :

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi dua hal berikut:

- Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* atau *qiradh* disebut juga perjanjian bagi hasil, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan *syara'*

bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.

Secara tehnis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah (General Investment)*

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah *shohibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka.

2. *Mudharabah Muqayyadah (Special Investment)*

Pada jenis akad ini, *shohibul maal* memberikan batasan atas dana yang di investasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan *special investment investor* tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.

- 1) Hukum *Mudharabah* dan dasar hukumnya.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutar uang. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, 2: 198 artinya:

'Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu.....'

- 2) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *mudharabah*, adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama adalah:

- a) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.

- b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (a) berbentuk uang, (b) jelas jumlahnya, (c) tunai, dan (d) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan modal *mudharabah*. Akan tetapi, jika modal itu berupa *wadi'ah* (titipan) Pemilik modal pada perdagangan, boleh dijadikan modal *mudharabah*. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan syafi'iyah, akad *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi ulama Hambali menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usaha itu.
- c) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagaan keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah, syarat seperti ini batal dan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal.

1) Berakhirnya akad *Mudharabah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.
- c) Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak huku.
- d) Jika pemilik modal *murtad* (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.

- e) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanaj (*manage*) oleh pekerja.

F. BAGI HASIL DAN RESIKO

Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perlindungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.. Persoalan resiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak mengadakan perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa. Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1237 yakni: "dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang". Adapun jenis-jenis resiko adalah:

1. Resiko pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Resiko ini mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait pembiayaan korporasi.

2. Resiko pasar

Resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Resiko ini terdiri dari resiko tingkat suku bunga, resiko pertukaran mata uang, resiko harga dan resiko likuiditas.

3. Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko ini terdiri dari resiko reputasi, resiko kepatuhan, resiko, transaksi, resiko strategis dan resiko hukum. Adapun dampak resiko operasional ini adalah:

- Penarikan besar besaran terhadap Dana Pihak Ketiga,
- Timbul masalah likuiditas
- Ditutup oleh Bank Indonesia
- Kebangkrutan.

Secara teoritis ada kekawatiran apabila dalam pembiayaan *mudharabah* terjadi kerugian yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak *debitur* terhadap ketentuan akad. Dengan adanya kekhawatiran tersebut diatas maka Bank Syariah dalam syarat pembiayaan *Mudharabah* mewajibkan adanya jaminan.

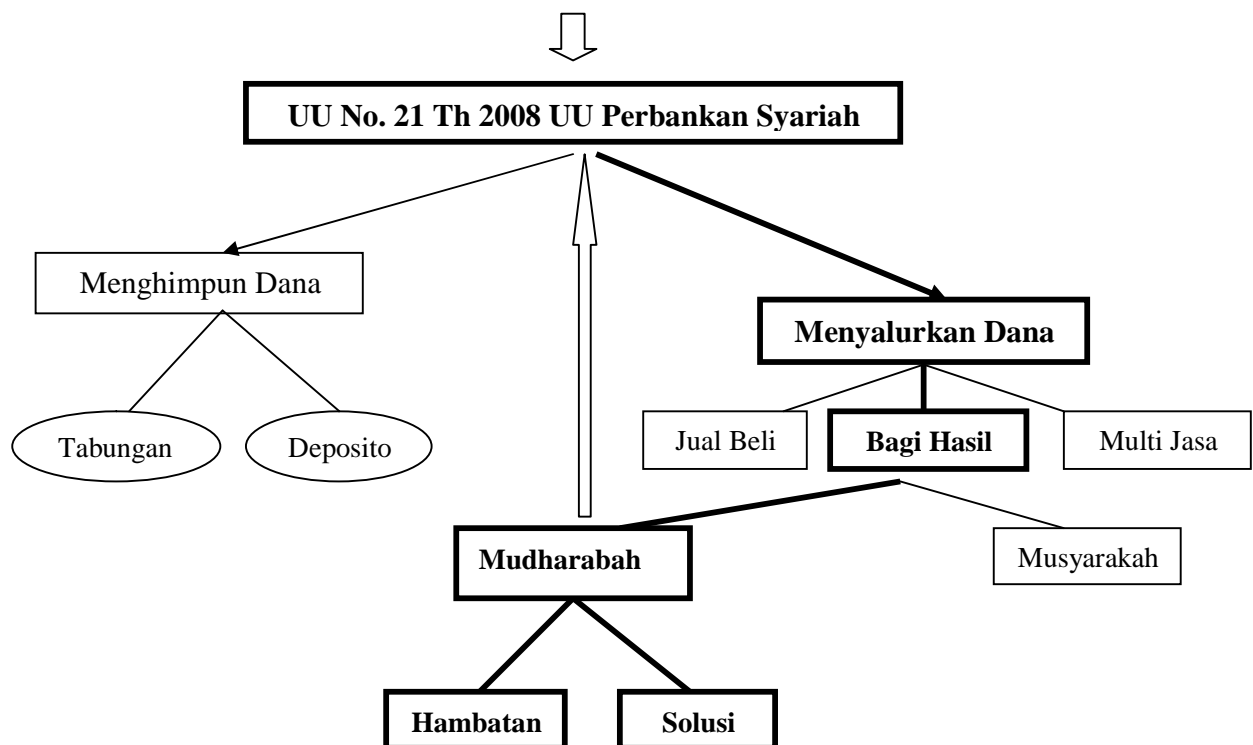
Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada *kreditur* yang diserahkan oleh *debitur* untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa *debitur* akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

KERANGKA BERPIKIR

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Adapun yang dimaksud Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas.

Bagan Kerangka Berfikir :



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu faktor penting untuk memberi arahan dan pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Dengan adanya metode penelitian maka diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto ada lima konsep hukum yaitu.

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
- b. Hukum adalah norma-norma positif didalam system perundang-undangan hukum nasional;
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematiskan sebagai *judge made law*;
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empirik;
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Penelitian ini mendasarkan hukum yang dilakukan dengan pendekatan *non doktrinal* atau pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan karena di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya diartikan atau dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya. Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dan hambatannya pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral dari aspek hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis memakai konsep hukum yang ke 5 (lima) yaitu hukum merupakan manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Dengan adanya metode penelitian maka diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

2 Lokasi penelitian;

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sebagai bank yang menerapkan bank syariah murni. Dipilihnya lokasi penelitian di Kabupaten Sragen, karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: pertama Penduduk Kabupaten Sragen mayoritas beragama Islam. Kedua, PT. BPRS Sukowati Sragen berupa Bank yang menerapkan prinsip syariah.

3. Sumber data;

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data dari sumber yang berbeda yaitu:

- a. Sumber Data Primer, Penentuan sample dilaksanakan dengan memakai *teknik purposive sampling yaitu pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata*, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sehingga subyek penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. Penelitian tersebut dilakukan terhadap responden, yakni pihak – pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi yang diperoleh dari dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian, 1). Direktur PT. BPRS Sukowati Sragen; 2). Kepala Bagian Marketing; 3). Karayawan ; 4). Tokoh Agama; 5). Nasabah Mudharabah
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan bahan pustaka, yang meliputi dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang undangan (hukum positif di Indonesia), maupun Al Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas para Ulama yang merupakan sumber hukum dalam Islam, termasuk didalamnya berbagai keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik yang berskala Lokal, Nasional, maupun internasional, hasil hasil penelitian, artikel artikel ilmiah, buku buku (literatur), dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip dan data statistik tentang perkembangan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti:
 1. Al Qur'an, Assunah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum islam.
 2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
 3. Undang undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
 4. Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/23/PBI/2009 tentang BPRS.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000
7. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
8. Perda Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang PT. BPRS Sukowati Sragen

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku hukum seperti Hukum perbankan, hukum perbankan syariah, hukum ekonomi, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel artikel.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus, dan ensiklopedi.

4. Teknik pengumpulan data;

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*liabrary research*):

- a. Pada tahap *observasi*: Merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dari obyek penelitian. Penulis melakukan penelitian di PT. BPRS Sukowati Sragen kemudian mencatat dan mencocokkan dengan teori agar tercapai sasaran penelitian. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa hal yang tidak sempat peneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya pertanyaan pada saat wawancara dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap.
- b. Pada tahap wawancara (*interview*): Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari sorang responden dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat mereka. Secara teknik ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik

tidak bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).

Metode wawancara yang dilakukan oleh penulis ini adalah metode campuran dengan menggabungkan metode terpimpin dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara penulis membuat pedoman wawancara yang nantinya akan dikembangkan secara bebas sesuai dengan kebutuhan data yang ingin penulis peroleh.

Untuk mendapatkan data yang penulis perlukan, antara lain penulis melakukan wawancara dengan Direktur Utama Ir Sunaryo, Direktur Operasional Fakhruddin Nur, S.Si dan Kepala Bagian Marketing Cahyo Saputro

- c. Studi kepustakaan (*library research*;) Dalam studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan – bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan – bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan.

5. Teknik analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*)

Berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batas-batas permasalahan. Proses ini berlangsung sampai dengan laporan penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

- b. Penyajian data (*data display*).

Suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

- c. Penarikan kesimpulan (*Conclusi data*)

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat,

dan proposisi-proposisi peneliti yang kompeten memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat , artinya bersikap terbuka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah PT. BPRS Sukowati Sragen

- a. Sejarah Berdirinya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen
- b. Dasar hukum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen
- c. Visi dan Misi
- d. Struktur Organisasi PT BPRS Sukowati Sragen
- e. Produk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen
- f. Program unggulan
- g. Mitra kerja
- h. Perkembangan data keuangan

2. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dan Hambatannya pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

a. Akad dalam kegiatan pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

Diantara akad yang digunakan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen diantaranya bagi hasil dengan akad *Mudharabah al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kegiatan itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola (*mudharib*).

Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Dalam pelaksanaannya di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen akad *mudharabah* ini dilakukan dengan *mudharabah muqayyadah* yaitu kerja sama antara *shahibul maal* sebagai pemilik modal dengan *mudharib* sebagai pengelola modal dimana jenis usaha waktu dan daerah bisnisnya dibatasi berdasarkan ketentuan yang disepakati.

b. Prinsip Bagi Hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.

Dari hasil penelitian di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen dana untuk pembiayaan belum terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kegiatan murabahah atau jual beli.

Berikut ini pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen pada periode Desember 2009.

1. Mudharabah Rp 131.066.665,
2. Murabahah Rp. 16.033.520.303,-
3. Musyarakah Rp.600.000.000,-
4. Multi jasa Rp.164.874.995,-
5. Qord Rp.100.000.000,-

Dari hasil penelitian terungkap bahwa rendahnya Pelaksanaan pembiayaan bagi hasil ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. sulit mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik, berintegritas tinggi, dan pekerja keras,
2. tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank,
3. masih kurangnya teknologi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil
4. masih kurangnya Sumber daya Manusia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen yang mengerti masalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
5. sikap masyarakat yang masih menganggap produk perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional,
6. ketidak efektifannya pembiayaan bagi hasil, dan
7. tidak adanya standar moral dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil

c. Tahapan-tahapan dalam Pelaksanaan kontrak Pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

- 1) Tahapan pranegosiasi
- 2) Tahapan Negosiasi
- 3) Tahapan inisiasi kontrak
- 4) Tahapan penandatanganan kontrak.

d. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam kegiatan pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

Hubungan antara Mudharib dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen adalah sifatnya kemitraan

Hubungan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian akad.

e. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.

Dari hasil penelitian penulis besarnya bagi hasil di perbankan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen adalah tergantung kesepakatan antara bank dengan nasabah bukan berdasarkan porsi setoran modal, seperti 60 % untuk bank dan 40 % untuk nasabah, 70 % untuk bank dan 30 % untuk nasabah, atau bahkan nasabah lebih besar dari pada bank. Kegiatan bagi hasil di dasarkan pada proyeksi-proyeksi atau asumsiasumsi yang terjadi berdasarkan kondisi riil di lapangan

Adapun cara penentuan bagi hasil yang di lakukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen adaiah dengan *revenue sharing* (bagi hasil), artinya bagi hasil dari pendapatan kotor usaha selama 1 (satu) bulan sebelum di kurangi dengan biaya biaya selama operasional selama satu bulan. Hal ini di maksudkan supaya ada yang dibagi dihasilkan antara bank dengan nasabah, karena tidak tertutup kemungkinan bank tidak mendapatkan dalam satu keuntungan sama sekali.

f. Sistem Jaminan dalam Pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

Jaminan merupakan upaya untuk memberikan kepastian kepada bank bahwa *mudharib* akan membayar segala kewajibannya

Dari hasil penelitian penulis di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen bahwa jaminan itu merupakan bukan sesuatu yang mutlak harus ada namun diprioritaskan adanya jaminan, artinya nasabah harus menyediakan jaminan untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan

3. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Prinsip bagi Hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

Wawancara tanggal 25 Januari 2010 di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang menjadi hambatan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukoawati Sragen dalam Pelaksanaan prinsip Bagi Hasil dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* secara umum dapat dibagi dalam dua faktor yaitu faktor yang bersifat internal dan faktor yang bersifat eksternal¹.

a. Faktor internal

1) Sumber daya manusia

Keahlian dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sangat penting dalam rangka berkompetisi dengan lembaga pembiayaan lain. Personal SDM yang menguasai dan memahami tentang perbankan syariah khususnya system bagi hasil dan resiko pada bank syariah sangat terbatas sehingga selama ini kendala di bidang sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam operasionalnya.

2) Tehnologi

System informasi dan teknologi yang ada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen di rasa masih kurang sehingga dalam penerapan pembiayaan bagi hasil masih kesulitan dalam menghitung dan memonitor besarnya keuntungan dan kerugian dari pembiayaan yang di kucurkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.

b. Faktor eksternal

1) Nasabah sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu disebabkan karena memang nasabah memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang nasabah tidak mungkin berprestasi lagi, atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

2) Perilaku Masyarakat.

Perilaku masyarakat yang masih menganggap produk bank syariah sama saja dengan bank konvensional juga menjadi kendala dalam Pelaksanaan prinsip bagi hasil. Padahal bank syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional.

¹ Wawancara dengan Bpk Fahrudin Nur, S.Si Direktur Operasional tanggal 25 Januari 2010

3) Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional disamping berfungsi sebagai pengawas kegiatan perbankan syariah juga berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa yang diperlukan sebagai referensi bagi kegiatan operasional dan transaksi-transaksi serta prinsip-prinsip yang di gunakan dalam sistem perbankan dan keuangan syariah yang diperlukan untuk menjamin agar Undang-undang perbankan dan peraturan pelaksanaannya benar-benar di laksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga ini juga melakukan audit kesyariaan terhadap keuangan syariah. Bahwa baru ada fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan mudharabah, namun kenyataannya Dewan Syariah Nasional baru ada di Jakarta sehingga sangat sulit untuk mengawasi bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia;

4) Moral nasabah

Tidak adanya standar moral yang dapat diterapkan dalam pembiayaan sehingga ada nasabah yang berbuat curang dengan membuat pembukuan ganda dan menyampaikan laporan dengan keuntungan yang lebih rendah kepada bank.

4. Solusi dalam menghadapi kendala operasional di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukoawati Sragen yaitu:

- a. Setiap Kantor Bank Syariah ditempatkan Dewan Pengawas Syariah yang setiap saat bisa mengawasi jalannya perbankan syariah.
- b. Mengharapkan peran serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam keuangan syariah.
- c. Melakukan beberapa training terhadap beberapa pegawai/staf PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen untuk memperdalam pengetahuan terhadap manajemen ekonomi syariah.
- d. Melakukan seminar-seminar dan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, birokrat, dan pengusaha untuk mensosialisasikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukoawati Sragen dan produk yang ada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukoawati Sragen.
- e. Untuk meminimalkan dan menghapus perilaku menyimpang dari nasabah maka PT. PBR Sukoawati Sragen menerapkan:

- 1) Bank mengumpulkan lebih banyak informasi yang relevan dengan kinerja nasabah. Melalui informasi itu pihak bank akan dapat menyimpulkan bahwa keadaan riil manakala keadaan riil itu memang direalisasikan.
- 2) Membuat akad/perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku usaha yang curang dari nasabah.
- 3) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen mengadakan monitoring, dan meminta laporan secara berkala kepada nasabah

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari perumusan masalah dan hasil penelitian, maka dalam penulisan tesis ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil dengan akad mudharabah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, namun masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad murabahah, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, tingginya resiko yang ditanggung oleh bank, masih kurangnya Sumber Daya Manusia, sikap masyarakat yang masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional dan tidak adanya standar moral dalam kegiatan pembiayaan.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen dalam prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah antara lain Sumber Daya Manusia yang masih kurang, Jaringan kantor yang masih terbatas

B. IMPLIKASI

1. Pelaksanaan akad Mudharabah dengan prinsip syariah berkesan cukup prosedural, dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah harus tunduk pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN, dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Serta mengharapkan semua Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah termasuk Akad Mudharabah, yang diatur dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000 M tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

2. Dengan adanya implikasi akad Mudharabah di harapkan PT. BPRS Sukowati Sragen untuk lebih mengembangkan Ekonomi/Investasi sesuai prinsip perbankan syariah yang tidak mengandung unsur Riba

C. SARAN

Berawal dari hasil penelitian, analisa dan kesimpulan diatas, maka dalam tesis ini disarankan sebagai berikut:

1. Ditempatkan Dewan Pengawas Syariah ditempat PT. BPRS Sukowati Sragen guna mengurangi timbulnya kontrak yang tidak sesuai dengan syariah;
2. Bahwa perekonomian Indonesia berbasis ekonomi kerakyatan maka PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen untuk mengoptimalkan perekonomian yang berbasis kemasyarakatan artinya banyak memberikan pembiayaan dalam kegiatan ekonomi riil antara lain Usaha Kecil Menengah dan bidang pertanian.
3. Untuk mengurangi kendala operasional seperti Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen dapat melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dalam menghadapi resiko kerugian yang besar selalu setiap pembiayaan harus diadakan seleksi terhadap mudharib secara ketat dan selalu diadakan monitoring pembukuan setiap saat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, 2006, Jakarta, Kencana,

Muhammad Firdaus NH, Sofiniyah Ghufroon, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Oktober 2005, cetakan I, Renaisan, Jakarta,

Mervyn K. Lewis, Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah, *Prinsip, Praktek dan Prospek*, Penerjemah Burhan Wirasubrata, 2005, cetakan ke II, PT, Serambi Ilmu Semesta,

Abdul Manan, H, *Hukum Perbankan Syariah*, 2008, Mahkamah Agung RI,

Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep dan Implementasi operasional*, 2001, Djambatan, Jakarta,

Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2008, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 2001, Gema Insani Press, Jakarta,

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, 1999, Pustaka Utama Grafiti,

Adi Sulistiyono, *Teori Hukum*, Bahan kuliah UNS,

Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum*, 1977, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. 1982.

Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, 1985, Sinar Baru, Bandung,

Yusuf Al-Qardawi, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, 2001, Era Intermedia, Solo,

Robert W. Hetner, *Islamisasi Kapitalisme : Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Di Indonesia*, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, 1998, Mizan, Bandung,

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 1992, Penerjemah: RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Robert W Heftier, Geger Tengger : *Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, 1999, LKIS bekerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta,

Radjasa Mu'tasim, dan Abdul Munir Mulkhan, *Bisnis Kaum Sufi : Studi Tarekat Dalam Masyarakat Industri*, 1998, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

HR. Muslim dalam Kitab Shahibnya dari Siti 'Aisyah dan Anas, dalam Yusuf Al Qardawi, *Peranan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, 1995, Robbani Press, Jakarta,

Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan dari judul aslinya: *Daurull Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishodil Islami*, Penerjemah Didin Hafhiduddin dkk, 1995, Robbani Press, Jakarta,

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia, 1999, Jakarta,

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, 2007, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Ctk, Pertama, Bulan Bintang, Jakarta.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikataarr Islam di Indonesia*, 2005, edisi I, ctk. Pertama, Kencana, Jakarta,

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, 2000, ctk. Pertama, Penerbit UII Press, Sragen,

Abdul Manan, H, *Hukum Kontrak dalam sistem ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung RI, 2008,

Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, 2002, PT Raja Grafindo Persada, Bandung,

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syriah, dalam Marian Darus Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, PT. Citra Aditya Bakhti Bandung,

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 2004, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi, UII Yoqakarta,

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1996),

Abdurrahman, H, *Hukum Persyarikatan Syariah*, 2008, Bahan kuliah S2 UNS,

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 2002, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,

Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, 1994, Edisi ke-2 , Jakarta,

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IB1, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, 2000, Djambatan, Jakarta,

Gunarto Suhardi, *Resiko Krimonalisasi Kredit Perbankan*, 2006, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1991, Intermasa Jakarta,

Adhiwarman A. Karim, H, *Ekonomi Islam, Suatu kajian Kontemporer*, 2001, Gema Insani, Jakarta.

Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2004, Kaki Langit. Jakarta,

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, 1999, Bank Indonesia, Jakarta,

Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, 1984, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta,

Setiyono, H, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, 2005, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soerjono Soekanto, *Penngantar Penelitian hukum*, 1986, UI Press,

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodolooi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1994, Ghalia Indonesia Jakarta,

S. Nasution, *Metodologi Pertelitian Naturalistik Kualitatif*, 1998, Tarsito, Bandung.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 2001, kerja sama Gema Insani Press dan Tazkia Institute, Jakarta, Data PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

Aplikasi formulir pembiayaan perbankan syariah

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 2004. Grafindo Persada, Jakarta

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2007, Raja Grafinso Persada, Jakarta,

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*. 2007, Serambi, Jakarta,

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1996. Jakarta,.

Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, 1977, CV Aneka, Semarang,

Purwahid patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, 1994, Mandar Maju, Bandung,

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Cammon Law*, 1996 Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Hartono Mardjono, *Petunjuk Fraktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermualah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, 2000, Studia Press, Jakarta,

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. 1997. Rajawali Pers, Jakarta,

Subekti, *Jaminan- jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, 1991. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasanudin Rahman, *AspekAspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, 1995. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Muhammad Syafi'i Antonio, *Tantangan Profesionalisme Industri Keuangan Syariah*, 24 Oktober 2007, Gatra.

Brosur PT. BPRS Sukowati Sragen

Data Elektronik

<http://myais.fsktm.um.edu.my>

<http://www.blogger.com>

<http://fikrieconomisjurnal.blogspot.com>

<http://konsultasi.wordpress.com>

<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah>,

http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/perbankan_islam,

<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah>

<http://majalahekonomisyariah.com/>

http://ib-bloggercompetition_kompasiana.com

<http://www.sragenkab.go.id/berita/berita.php>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR/1991

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk
Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD.BPR Syariah)
Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati
Sragen.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN-
MUI/IV/2000